

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki variabel atau konsep yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai Dampak Sosial Pariwisata. Kajian konseptual ini mencantumkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Rofi Prabowo, Uke Hani Rasalwati, dan Nenden Rainy Sunday. (2021). *Dampak Sosial Pembangunan Desa Wisata Terhadap Masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.*

Penelitian ini secara relevan mempertimbangkan riset sebelumnya yang meneliti mengenai isu dampak sosial pariwisata. Transformasi yang dialami oleh suatu desa yang menjadi desa wisata mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat pada aspek ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat (Prabowo et al., 2021). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, yaitu dampak sosial pariwisata dan juga subjek penelitian yaitu masyarakat. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan dan lokasi penelitian.

2. Firdaus Yusrizal dan Agung Yoga Asmoro. (2020). *Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta*

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana isu masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai perkembangan

pariwisata serta dampak yang mengikutinya. Pariwisata diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk membuka peluang usaha pariwisata seluas-luasnya, hingga pada akhirnya kemandirian rakyat melalui usaha pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara umum (Yusrizal & Agung, 2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian mengenai dampak sosial pariwisata serta subjek penelitian yaitu masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu eksploratori kualitatif dan lokasi penelitian

3. Elisa Dwi Rohani dan Nuryuda Irdana. (2021). *Dampak Sosial Budaya Pariwisata : Studi Kasus Desa Wisata Pulesari dan Desa Ekowisata Panch*

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana isu masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata. Adanya desa wisata membuat terjadinya perubahan sosial masyarakat, sehingga aktivitas wisata tidak dapat dihindari dari adanya dampak positif maupun negatif sosial budaya masyarakat setempat (Rohani & Irdana, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel penelitian yaitu dampak sosial. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pada penelitian ini menggunakan studi banding.

4. Risfaisal, Kaharuddin, dan Nasrah. (2022). *Dampak Sosial Ekonomi Objek Wisata Lappalaona Kabupaten Barru*

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana isu masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai dampak sosial pariwisata. Dampak sosial ekonomi suatu objek wisata dapat dilihat melalui proses pembentukan dan dampak sosial ekonomi yang menyertainya (Risfaisal et al., 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian yaitu dampak sosial pariwisata serta subjek penelitian yaitu masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Rinnanik dan Ahmad Mustofa. (2021). *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Kabupaten Lampung Timur*

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana isu masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai dampak sosial pengembangan suatu wisata. Dampak pariwisata diasumsikan akan menimbulkan perubahan sosial dan budaya akibat kedatangan wisatawan dengan 3 (tiga) asumsi umum bahwa perubahan yang dicapai oleh interupsi luar, perkembangan sebagian besar merusak budaya penduduk asli, serta perubahan akan membawa homogenisasi (Rinnanik & Mustofa, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian yaitu dampak sosial adanya pengembangan wisata

terhadap masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif.

6. Haris Aminuddin, Faza Dhora Nailufar, M. Alexander Mujiburrahman. (2022). *Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana isu masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai dampak pengembangan pariwisata terhadap masyarakat setempat. Pengembangan sektor wisata mempengaruhi pembangunan, sehingga pengembangan pariwisata dapat mendorong peningkatan dan pertumbuhan di sektor lainnya (Aminuddin et al., 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada salah satu fokus penelitian, yaitu dampak pengembangan pariwisata. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif.

Tabel 2.1 Keterkaitan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rofi Prabowo, Uke Hani Rasalwati, & Nenden Rainy Sundry (2021)	Dampak Sosial Pembangunan Desa Wisata Terhadap Masyarakat di Desa Serang Kecamatan Karangreja	Kualitatif Deskriptif	Masyarakat Desa Serang mengalami perubahan pekerjaan dan cara berinteraksi menggunakan teknologi yang lebih canggih. Terjadi pelanggaran nilai dan norma, adat istiadat mengalami peningkatan,	1. Objek penelitian yaitu dampak sosial terhadap aspek cara hidup (<i>ways of life</i> : bekerja dan interaksi sosial), aspek budaya (sistem

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kabupaten Purbalingga		kepercayaan masyarakat tidak mengalami perubahan, penurunan kohesi sosial dan terganggunya stabilitas masyarakat karena timbulnya kecemburuan dan kesenjangan sosial yang dapat memicu timbulnya konflik sosial.	nilai dan norma, kepercayaan), dan aspek komunitas (struktur penduduk, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, dan fasilitas publik)
2.	Firdaus Yusrizal & Agung Yoga Asmoro (2020)	Dampak Sosial Budaya Pariwisata : Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta	Kualitatif Eksploratif	Perkembangan pariwisata di Yogyakarta semakin mempertegas kemajemukan masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi berujung pada konflik sosial atau terciptanya integrasi sosial di masyarakat. Namun nilai kerukunan dan rasa hormat, serta budaya gotong royong ditambah dengan figur positif dari Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mampu memperkecil konflik yang terjadi selama ini.	2. Metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 3. Lokasi penelitian
3.	Elisa Dwi Rohani & Nuryuda Irdana. (2022)	Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Studi Kasus Desa Wisata Pulesari dan Desa	Studi Komparatif	Dengan adanya Desa Wisata Pulesari dan Desa Wisata Pancoh terdapat perubahan sosial masyarakat, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan. Adanya desa-desa	

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ekowisata Pancoh		wisata tersebut berdampak positif maupun negatif terhadap aspek sosial masyarakat sekitar. Adapun dampak positif adanya desa wisata adalah terbangunnya <i>community spirit</i> secara alami, <i>strengthening organizing</i> , munculnya pemimpin, pelestarian budaya lokal, dan pertukaran informasi. Adapun dampak negatif adalah adanya migrasi, permasalahan sosial terkait obat-obatan terlarang maupun prostitusi, timbulnya konflik sosial, serta komersialisasi budaya dan meniru budaya lain.	
4.	Risfaisal, Kaharuddin, & Nasrah. (2022)	Dampak Sosial Ekonomi Objek Wisata Lappalaona Kabupaten Barru	Kualitatif Deskriptif	Terdapat peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lowongan kerja baru, membuka usaha baru, dan masyarakat secara langsung terlibat dalam pembangunan objek wisata. Fasilitas yang ada belum lengkap, terjadi konflik pada masyarakat, belum terstrukturnya pengelola.	

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Rinnanik & Ahmad Mustofa. (2021)	Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Kabupaten Lampung Timur	Kualitatif Deskriptif	Terjadi peningkatan pedagang ketika hari raya, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, terjadi peningkatan kepemilikan kekayaan dan fasilitas, terbukanya peluang kerja, terjadi perubahan bahasa dan tata krama, peningkatan partisipasi masyarakat, perubahan pola pikir masyarakat mulai sadar pelestarian dan penanaman tanaman, perubahan kenaikan harga, dan pernah terjadinya tindak kriminal pencurian.	
6.	Haris Aminuddin, Faza Dhora Nailufar, M. Alexander Mujiburrahman (2022)	Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat	Kualitatif Deskriptif	Kehadiran Objek Wisata Wonosalam meningkatkan interaksi sosial dengan pendatang, persaingan antar pedagang, menambah pendapatan masyarakat sekitar yang memicu bertambahnya pendapatan ekonomi masyarakat.	

Sumber: Penelitian Tahun 2024

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam penelitian mengenai dampak sosial budaya maupun ekonomi adanya desa wisata dan pariwisata. Keenam penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana dampak sosial yang diakibatkan oleh adanya kegiatan

pariwisata yang ada, yang tentu saja sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini akan menjadi dasar rujukan untuk mengembangkan penelitian, sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian akan menjadikan keberagaman dan perbandingan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *novelty* (kebaruan) pada penelitian ini terletak pada penggunaan teori Armour untuk menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi dampak sosial suatu pembangunan maupun pengembangan, yaitu aspek cara hidup (*way of life*), aspek budaya, dan aspek komunitas. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang menggunakan teori yang sama, namun penggunaan teori ini dalam konteks pengembangan wisata, khususnya di Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran memberikan perspektif baru. Penelitian ini memperluas aplikasi teori Armour dengan menilai dampak sosial terhadap aspek cara hidup (*way of life*), budaya, dan komunitas yang belum diteliti secara mendalam dalam konteks pengembangan wisata.

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian yang berada di Kalurahan Nglanggeran memungkinkan terdapat karakteristik sosial, budaya, dan komunitas yang unik daripada lokasi penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan terdapat penilaian yang lebih spesifik terhadap bagaimana teori Armour berlaku di Kalurahan Nglanggeran.

Periode waktu yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya memungkinkan terdapat variasi dari dampak sosial yang terjadi. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang tentunya

berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang secara numerik yang dapat diukur dan lebih akurat tentang fenomena yang diamati.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi dampak sosial yang terjadi akibat pengembangan kawasan wisata, tetapi juga mengusulkan program dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat. Program ini dirancang sesuai dengan analisa masalah, analisa kebutuhan, dan sistem sumber yang ada sehingga menjadikan program tersebut relevan dan aplikatif.

2.2. Teori yang Mendasari Penelitian

2.2.1. Kajian Konseptual tentang Dampak Sosial

2.2.1.1. Definisi Dampak Sosial

Suratmo (2004) dalam Pitana (2005) mengemukakan bahwa dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan sebagai hasil dari aktivitas manusia. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Hadi (2009) yang menyatakan bahwa dampak sosial adalah perubahan yang timbul pada manusia dan masyarakat akibat dari aktivitas pembangunan, yang dapat berupa proyek, program, atau kebijakan yang diterapkan di suatu masyarakat. Irwan (2018) mendefinisikan dampak sosial sebagai pengaruh yang bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain menyangkut kepada aspek-aspek kehidupan masyarakat dengan adanya perubahan kondisi yang meliputi terhadap struktur sosial dalam masyarakat tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dampak sosial terjadi karena adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya,

termasuk didalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat.

2.2.1.2.Aspek-aspek Dampak Sosial

Sudharto (1995) dalam Nuraeni (2018) menyatakan bahwa dampak sosial merupakan konsekuensi sosial yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Perubahan tersebut menurut Armour (1989) dalam Hadi (2009) meliputi aspek-aspek:

1. Cara hidup (*way of life*)

Cara hidup yang dimaksud termasuk didalamnya bagaimana cara masyarakat bekerja dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bekerja menurut Notoatmodjo (2014) dalam Heni Hendrawati (2016) adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sehingga memperoleh penghasilan. Interaksi menurut Walgito (2010) adalah hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya, dimana saling mempengaruhi, sehingga terdapat adanya hubungan timbal balik.

2. Budaya

Aspek budaya yang dimaksud meliputi sistem nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat setempat. Koentjaraningrat (1992:26) dalam Sauri (2019) pada menyatakan bahwa sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar keluarga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup. Sastrapratedja dalam Adisusilo (2012) menjelaskan bahwa norma adalah aturan, ukuran, patokan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian atas perilaku manusia. Nilai dan norma merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan nilai

dan norma selalu berkaitan dalam kehidupan masyarakat yang teratur. Adapun sistem kepercayaan Soekadijo (1993) dalam Firmansyah (2017) adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat dihipotesiskan dalam setiap masyarakat di dunia.

3. Komunitas

Aspek komunitas yang dimaksud meliputi struktur penduduk, kohesi sosial, kestabilan masyarakat yang bersangkutan, sarana dan prasarana yang diakui sebagai fasilitas publik oleh masyarakat. Struktur yang ada dalam suatu masyarakat dapat berubah karena berbagai faktor seperti kematian, kelahiran, ataupun migrasi suatu masyarakat. Faisal (2018) menjelaskan bahwa kohesi sosial terbentuk dari rasa saling percaya diantara anggota.

Stabilitas sosial menurut Nurjanah (2023) merupakan keseimbangan pada suatu keadaan dimana sedang terjadinya masalah namun tetap pada posisinya dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sementara fasilitas publik menurut Carr et al (1992) adalah ruang atau lahan umum dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan fungsional ataupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan rutin kehidupan sehari-hari ataupun upacara atau pesta yang dilakukan secara berkala.

Aspek-aspek dampak sosial menurut Armour terbagi menjadi tiga, yaitu aspek cara hidup (*way of life*), aspek budaya, dan aspek komunitas. Aspek cara hidup (*way of life*) terdiri dari bagaimana masyarakat bekerja dan berinteraksi. Aspek budaya terdiri dari sistem nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat setempat. Sedangkan aspek komunitas terdiri dari struktur penduduk, kohesi sosial, kestabilan masyarakat yang bersangkutan, sarana dan prasarana yang

diakui sebagai fasilitas publik oleh masyarakat.

2.2.1.3. Jenis-jenis Dampak Sosial

Jenis dampak sosial sangatlah bervariasi, baik positif maupun negatif, yang bisa terjadi secara sengaja atau tidak disengaja, langsung atau tidak langsung, bahkan dapat muncul pada masa mendatang dan mempengaruhi berbagai individu, termasuk mereka yang tidak menjadi sasaran utama tetapi tetap memperoleh manfaat tidak langsung dari dampak tersebut. Afrizal (2007) mengklasifikasikan jenis-jenis dampak sosial sebagai berikut:

1. Dampak Positif (progress) merujuk pada dampak, pengaruh, atau efek yang dianggap menguntungkan baik oleh pihak yang melakukan pembangunan maupun oleh pihak lainnya.
2. Dampak Negatif (regress) adalah dampak, pengaruh, atau efek yang dianggap merugikan baik oleh pihak yang melakukan pembangunan maupun oleh pihak lainnya.

2.2.1.4. Prinsip Analisis Dampak Sosial

AMPG Internasional (2016) mengidentifikasi enam prinsip dalam penilaian dampak sosial sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang populasi lokal dan regional serta kondisi lingkungan yang akan terpengaruh oleh tindakan, program, atau kebijakan yang diusulkan.
2. Fokus pada elemen-elemen kunci dari lingkungan manusia yang terkait dengan tindakan, program, atau kebijakan yang diusulkan.

3. Penilaian Dampak Sosial didasarkan pada konsep dan metode penelitian ilmiah yang kokoh dan dapat direplikasi. Proses analisisnya mengikuti etika bahwa ilmu pengetahuan yang baik (ilmiah) akan menghasilkan keputusan yang terinformasi dan lebih baik.
4. Menyediakan informasi berkualitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Etika ilmu pengetahuan yang baik mengharuskan pengumpulan data berkualitas yang mewakili semua isu dan sudut pandang, serta analisis informasi dan alternatif yang jelas, holistik, dan transparan.
5. Memastikan bahwa semua masalah keadilan lingkungan dideskripsikan dan dianalisis secara menyeluruh. Praktisi SIA harus mengidentifikasi populasi yang kurang beruntung, berisiko, dan minoritas (misalnya berdasarkan ras, asal-usul nasional, gender, disabilitas, dan agama) yang terpengaruh oleh tindakan, program, atau kebijakan yang diusulkan, dan memasukkan informasi tentang populasi ini ke dalam deskripsi dan analisis Penilaian Dampak Sosial.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek, program, atau kebijakan, dan mengusulkan langkah mitigasi jika diperlukan. Penggunaan desain penelitian dan basis data yang telah dibangun untuk penilaian dampak harus menyediakan dasar untuk memantau dan mengevaluasi dampak aktual dari alternatif yang dipilih (proyek).

2.2.2. Kajian Konseptual tentang Pengembangan Kawasan Wisata Gunung

Api Purba

2.2.2.1. Kawasan Wisata Gunung Api Purba

Kawasan wisata menurut UU No.9 Tahun 1990 adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Kawasan Wisata Gunung Api Purba sendiri terletak di kawasan Baturagung di bagian utara Kabupaten Gunungkidul dengan ketinggian antara 200-700 mdpl. Kawasan ini merupakan kawasan yang secara litologi tersusun oleh material vulkanik tua dengan keindahan bentang alam dan secara geologi sangat unik dan bernilai ilmiah tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan referensi yang ada, dinyatakan bahwa gunung Nglanggeran adalah gunung berapi purba.

Kawasan Wisata Gunung Api Purba di Kalurahan Nglanggeran ini memiliki paket wisata yang sangat lengkap dengan adanya berbagai daya tarik yang ditawarkan. Daya tarik yang luar biasa tersebut juga didukung oleh fasilitas penunjang yang lengkap dan kemudahan aksesibilitas selama menuju dan berada di kawasan wisata tersebut.

Gunn (1994) dalam Yogi Pratama (2016) menyatakan bahwa kawasan wisata yang baik dan berhasil secara optimal didasarkan pada empat aspek, yaitu:

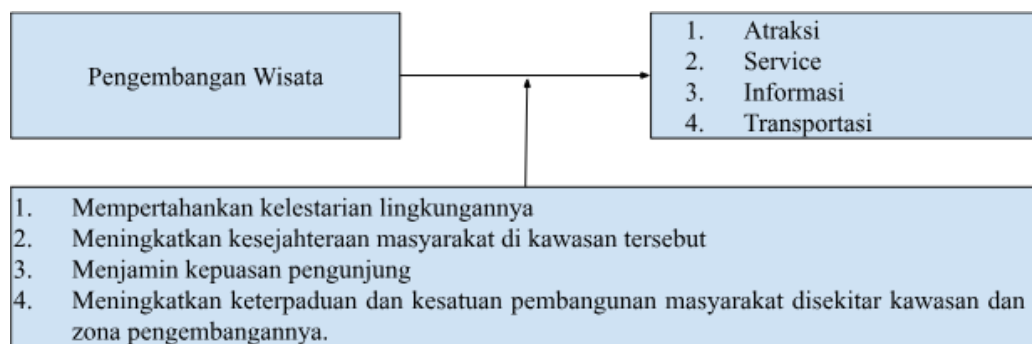
1. Mempertahankan kelestarian lingkungannya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
3. Menjamin kepuasan pengunjung
4. Meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat disekitar kawasan dan zona pengembangannya.

2.2.2.2.Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba

Sastrawati (2003) dalam Yogi Pratama (2016), definisi prinsip pengembangan kawasan wisata merupakan dasar-dasar penataan kawasan yang

memasukkan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam komponen penataan kawasan wisata. Adapun aspek yang terkait dalam penataan kawasan wisata berupa citra (*image*), keteraturan, bangunan, keselamatan, keamanan, dan *pedestrian ways*.

Pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah tentunya juga terjadi pengembangan potensi fisik di wilayah tersebut. Gunn (1994) dalam Yogi Pratama (2016) menyebutkan bahwa terdapat empat kategori yang mempengaruhi wisata, yaitu atraksi/daya tarik, *service*, informasi, dan transportasi. Konsep pengembangan kawasan wisata dapat diintisarikan menjadi berikut.



Gambar 2.1 Bagan Konsep Pengembangan Kawasan Wisata

Sumber: Gunn (1994) dalam Yogi Pratama (2016)

Kawasan Wisata Gunung Api Purba telah menerapkan prinsip ekowisata yang berkelanjutan, dibuktikan dengan adanya sertifikat No. STC-04/XII/2020 oleh Lembaga Sertifikasi Dewan Kepariwisata Berkelanjutan Indonesia (CB-ISTC). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU No.10 Tahun 2009, bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, dan proporsionalitas, serta memberdayakan masyarakat setempat. Dalam rangka memenuhi prinsip tersebut, konsep desa wisata melalui pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) mulai dikembangkan.

Fildzah (2015) menjelaskan bahwa CBT merupakan konsep pariwisata dimana pariwisata dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan konsep pengembangan masyarakat. Desa Wisata Nglanggeran sendiri telah menggunakan konsep CBT dalam pelaksanaan kegiatan pariwisatanya. Desa ini bahkan pernah meraih penghargaan sebagai Pemenang Desa Wisata Terbaik I Indonesia dan menerima penghargaan *ASEAN Community Based Tourism 2017* (Kemenparekraf, 2021).

2.2.3. Kajian Konseptual tentang Masyarakat

2.2.3.1. Definisi Masyarakat

Ralph Linton (dalam Soekanto, 2006:22) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan kerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soekanto, 2006:22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Oleh karena itu, masyarakat merupakan kelompok manusia yang berinteraksi dalam hubungan sosial yang berdasarkan pada kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, serta memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang mengikat mereka dalam kesamaan tersebut.

2.2.3.2. Tipe Masyarakat

Soerjono Soekanto (2013) mengungkapkan bahwa tipe masyarakat dapat terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Masyarakat Tradisional

Istilah tradisional berasal dari kata tradisi atau traditum yang berarti sesuatu yang diteruskan dari masa lalu menuju masa sekarang. Tradisi terbentuk melalui pemikiran, imajinasi, dan tindakan dari seluruh anggota masyarakat, kemudian diwariskan secara turun temurun. Tradisi dapat berupa objek kebendaan, sistem kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan kelompok masyarakat yang memelihara dan mewarisi tradisi, adat istiadat, sistem nilai, norma, dan warisan budaya dari generasi sebelumnya. Karena itu, masyarakat tradisional sering diidentifikasi dengan komunitas pedesaan yang menjalani kehidupan sederhana dan cenderung mempertahankan gaya hidup tradisional mereka, sehingga jarang terpengaruh oleh kemajuan modernisasi.

2. Tipe Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah kelompok masyarakat di mana sebagian besar penduduknya memiliki nilai-nilai budaya yang terfokus pada kehidupan dalam peradaban saat ini. Mereka umumnya tinggal di daerah perkotaan, yang juga dikenal sebagai masyarakat kota. Namun tidak semua masyarakat kota tidak dapat disebut masyarakat modern, sebab orang kota tidak memiliki orientasi ke masa kini, misalnya gelandangan.

Salah satu ciri masyarakat modern adalah hubungan antar manusia lebih sering didasarkan pada kepentingan pribadi. Hubungan antar masyarakat dilakukan secara terbuka dengan suasana saling mempengaruhi. Masyarakat modern memiliki kepercayaan kuat akan ilmu pengetahuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tipe ini dibagi ke dalam macam-macam profesi yang dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan dan kejuruan.

2.2.3.3. Karakteristik Masyarakat

Soerjono Soekanto (2013) menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Hidup Berkelompok

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Ketidakmampuan tersebut kemudian mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok. Hal tersebut dikarenakan manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain yang kemudian mengantarkan masing-masing individu hidup bermasyarakat.

2. Melahirkan kebudayaan

Ketika manusia bergabung dalam kelompok, mereka selalu berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manusia berusaha untuk menyatukan pikiran dan pengalaman mereka untuk membentuk suatu kerangka yang dapat menjadi pedoman bagi perilaku mereka, yang dikenal sebagai kebudayaan. Kebudayaan tersebut kemudian dijaga dan diturunkan kepada generasi berikutnya.

3. Mengalami Perubahan

Beragam latar belakang menggabungkan setiap individu ke dalam suatu masyarakat yang mengakibatkan manusia mengalami perubahan. Perubahan tersebut dianggap sebagai usaha masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebagai contoh, masyarakat mulai mengadopsi penggunaan surat elektronik sebagai pengganti surat kertas karena pengaruh kemajuan teknologi.

4. Berinteraksi

Interaksi merupakan elemen kunci dalam pembentukan masyarakat, dimana individu berusaha untuk mencapai tujuan, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Melalui interaksi ini, masyarakat menciptakan suatu entitas sosial yang hidup.

5. Terdapat Kepemimpinan

Masyarakat cenderung mematuhi aturan yang berlaku di lingkungannya. Sebagai contoh, di dalam keluarga, kepala keluarga memiliki otoritas tertinggi untuk melindungi anggota keluarganya. Istri dan anak-anak patuh kepada ayah atau suami mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, terdapat peran pemimpin yang membantu mengintegrasikan individu-individu.

6. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial menentukan posisi dan peran seseorang dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban individu atau kelompok dapat menghasilkan pembagian masyarakat ke dalam berbagai kelas. Dalam kehidupan sosial, stratifikasi sosial didasarkan pada faktor-faktor seperti

kasta sosial, usia, etnis, pendidikan, dan berbagai aspek lain yang menciptakan keragaman dalam masyarakat.

2.2.3.4.Fungsi Sosial Masyarakat

Soekanto (2013) menyebutkan terdapat beberapa fungsi sosial dari masyarakat yang mencakup sebagai berikut:

1. Fungsi adaptasi, mengacu pada kemampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan hidupnya.
2. Fungsi integrasi, mencakup upaya untuk menjaga kondisi yang diperlukan antara unit-unit dalam suatu sistem sosial, terutama dalam hal kontribusi terhadap organisasi dan peranannya dalam keseluruhan sistem.
3. Fungsi mempertahankan pola, mencakup upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat, serta hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan.
4. Fungsi pencapaian tugas, mencakup kemampuan masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan penting dan memobilisasi sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan tersebut, termasuk hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem aksi kepribadian.

Raymond Firth (dalam Soekanto, 2013) mengidentifikasi empat faktor penting yang dapat menunjukkan eksistensi dan fungsi sosial dari suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. *Social Alignment*, mencakup struktur sosial yang meliputi sistem pengelompokan berdasarkan seks, umur, kekerabatan, bentuk-bentuk

perkumpulan berdasarkan pekerjaan yang sama, perkumpulan rekreasi, kedudukan atau status peranan.

2. *Social Controls*, merupakan sistem dan proses yang mengatur aktivitas dan perilaku para anggota masyarakat. Sistem inilah dikenal sebagai sistem pengendalian sosial yang berfungsi untuk mengendalikan para anggota masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya.
3. *Social Media*, merupakan peralatan dan perlengkapan, baik berupa benda maupun bahasa yang dijadikan sebagai media oleh masyarakat dalam melangsungkan komunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya.
4. *Social Standards*, merupakan kriteria sosial yang digunakan untuk menentukan dan menilai seluruh kegiatan atau mengevaluasi efektivitas suatu kegiatan.

Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa terdapat mekanisme pengaturan tertentu yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, harmoni, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat dapat menunjukkan eksistensinya dan menjalankan fungsi sosialnya dalam menjaga kelangsungan hidupnya sebagai sebuah entitas sosial.

2.2.4. Kajian Konseptual tentang Kewirausahaan

2.2.4.1. Pengertian Kewirausahaan

Richard Cantillon yang dikutip dalam Firmansyah & Roosmawati (2019) menyebutkan bahwa “*entrepreneur is an innovator and individual developing something unique and new*”. Mas'ud dan Mahmud Machfoedz dalam Firmansyah & Roosmawati (2019:2), menjelaskan bahwa wirausaha merupakan inovator yang

memiliki kemampuan untuk mengubah kesempatan menjadi sebuah ide yang dapat dijual, serta mampu memberikan nilai tambah melalui upaya, waktu, biaya, serta kemampuan dengan tujuan dalam mendapatkan keuntungan.

Firmansyah & Roosmawati (2019) menggambarkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif dan berbeda yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Sedangkan Sudomo dalam Firmansyah dan Roosmawati (2019) menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yaitu orang yang mempunyai sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil resiko untuk mewujudkan ide dan gagasannya. Hal itu berarti kewirausahaan merupakan seseorang yang memiliki sifat wirausaha yang mengerjakan proses dalam melakukan kegiatan yang baru, inovatif dan berbeda.

Rusdiana (2018) juga menjelaskan bahwa wirausaha memiliki dua peran yaitu sebagai penemu dan perencana. Seorang wirausaha senantiasa menemukan menciptakan produk, teknologi, cara, dan ide usaha. Sedangkan sebagai perencana, wirausaha berperan untuk membuat rancangan tentang usaha, merencanakan strategi usaha dan merencanakan ide dan peluang dalam usaha.

Pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa wirausaha merupakan seorang inovator yang mampu mengembangkan kesempatan menjadi ide yang unik dan baru serta dapat dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2.2.4.2.Ciri-Ciri Wirausaha

Firmansyah & Roosmawati (2019) menjelaskan bahwa untuk menjadi wirausaha harus memenuhi definisi wirausaha, yaitu:

1. Memiliki keberanian dan daya kreasi.
2. Memiliki sifat berani mengambil resiko, yang tentu saja harus sejalan dengan perencanaan dan pengamatan yang sebelumnya pernah dilakukan.
3. Memiliki semangat dan kemauan keras untuk menuju kesuksesan.
4. Memiliki persepsi dan analisis yang tepat agar mendekati tujuan yang ingin dicapai.
5. Tidak konsumtif.
6. Memiliki jiwa kepemimpinan.
7. Berorientasi masa depan, artinya senantiasa melihat peluang-peluang disekitarnya.

Pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan harus berani dan inovatif, memiliki semangat yang tinggi, memiliki persepsi dan analisis yang tepat, tidak konsumtif, memiliki jiwa kepemimpinan, serta berorientasi pada masa depan.

2.2.4.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kewirausahaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Suryana (dalam Rusdiana, 2018) mengungkapkan faktor yang mempengaruhi kewirausahaan sebagai berikut:

1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu dan kerap disebut potensi individu, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kebutuhan berprestasi mendorong individu untuk menghasilkan yang terbaik, memiliki inisiatif, memiliki keinginan kuat dalam mengungkapkan ide dan menyampaikan gagasan yang dimiliki

- 2) *Internal locus control*, merupakan keyakinan pada individu bahwa kegagalan dan kesuksesan dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan.
 - 3) Kebutuhan akan kebebasan, individu memiliki kebutuhan untuk mengambil keputusan, menentukan tujuan, serta melakukan tindakan dalam mencapai tujuan sesuai dengan caranya sendiri.
 - 4) Nilai-nilai pribadi menjadi landasan bagi individu ketika mengambil keputusan dan membuat perencanaan untuk mencapai kesuksesan.
 - 5) Pengalaman kerja dalam keterlibatan langsung dalam dunia usaha mempengaruhi individu dalam menyusun rencana dan melakukan tindakan selanjutnya.
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, yaitu:
- 1) *Role model*, berperan sebagai mentor bagi individu karena dalam melakukan kegiatan wirausaha seorang individu memerlukan dukungan dan nasihat pada tiap tahapan berwirausaha.
 - 2) Dukungan keluarga dan orang terdekat akan mempermudah individu serta menjadi sumber kekuatan apabila menghadapi suatu permasalahan.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi suatu kegiatan berwirausaha adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan akan kebebasan individu, nilai-nilai pribadi individu, serta pengalaman yang dimiliki oleh suatu individu tersebut. Sedangkan pada faktor eksternal meliputi *role model*, serta dukungan keluarga dan orang terdekat.

2.2.4.4. Manfaat Berwirausaha

Rusfiana (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui berwirausaha yang tidak dapat diperoleh apabila memiliki karir di lembaga maupun instansi milik orang lain. Manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan berwirausaha adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kebebasan dalam mengaktualisasikan potensi diri mereka. Melalui wirausaha, seseorang akan memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri dengan menentukan dan mengontrol tujuan yang ingin dicapai.
2. Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat sekitarnya. Pemberian layanan kepada seluruh masyarakat, terutama konsumen yang dilandasi dengan tanggung jawab melalui penciptaan produk yang berkualitas akan berdampak pada pengakuan dan kepercayaan masyarakat.
3. Mendapat manfaat untuk diri sendiri dan masyarakat, serta dapat memotivasi orang lain untuk mulai berwirausaha.

Manfaat wirausaha yang dapat diperoleh bagi diri sendiri dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wirausaha yang melakukan aktivitas pekerjaannya dengan motivasi dan tanpa terbebani akan berpengaruh pada kesuksesan karir.

2.2.5. Kajian Konseptual tentang Praktik Pekerja Sosial Komunitas

2.2.5.1. Pengertian Praktik Pekerjaan Sosial Komunitas

Praktik pekerjaan sosial makro berasal dari berbagai macam model dan pendekatan yang sejalan dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan pekerjaan sosial. Secara umum, praktik pekerjaan sosial makro mencakup

perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan. Pekerjaan sosial makro melibatkan beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor serta instansi terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan hingga evaluasi program atau proyek tersebut.

2.2.5.2. Model Praktik Pekerjaan Komunitas

Jack Rothman dalam Suharto (2017) menyatakan bahwa terdapat tiga model pekerjaan sosial dengan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari anggota masyarakat. Model ini memandang bahwa anggota masyarakat bukan sebagai individu dengan masalah, tetapi sebagai entitas unik yang memiliki potensi yang belum sepenuhnya dikembangkan. Pendekatan ini berfokus pada proses pencapaian tujuan (*process goal*) daripada tugas atau tujuan hasil (*task or product goal*). Peran utama pekerja sosial dalam model ini adalah sebagai enabler, katalisator pencapaian hasil, koordinator serta dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan etik.

2. Perencanaan Sosial (*Social Planning*)

Perencanaan sosial menekankan pada proses teknis untuk menangani masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Model ini melibatkan berbagai sistem dalam masyarakat serta menentukan prioritas sumber daya dan program-program. Model ini menggunakan pendekatan rasional untuk mengontrol

perubahan sosial dan dianggap sebagai proses pragmatis untuk membuat keputusan dan mengimplementasikan tindakan guna mengatasi masalah sosial tertentu sekaligus mencegah timbulnya kembali masalah sosial tertentu yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan kenakalan remaja. Pekerja sosial dalam model ini sering bekerja sebagai ahli di dalam struktur kekuasaan seperti pemerintah, yayasan, atau lembaga lainnya. Peranan perencanaan dalam model ini meliputi pengumpulan data/fakta, menganalisis data, dan bekerja sebagai perancang program.

3. Aksi Sosial (*Social Action*)

Aksi sosial merupakan usaha untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih adil serta usaha untuk memperbaiki kebijakan sosial dan kebijaksanaan umum. Teknik yang paling sering dilakukan dalam model aksi sosial adalah kampanye sosial. Kampanye sosial pada dasarnya ditujukan untuk mempengaruhi pihak lain agar memenuhi tuntutan perubahan yang ingin dicapai. Beberapa bentuk atau media untuk melakukan kampanye sosial seperti menulis artikel, dialog publik dengan pembuat kebijakan dan melakukan *happening art* dalam bentuk kesenian.

Model pendekatan pekerja sosial yang digunakan dalam usulan program penelitian ini adalah model pendekatan pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) dan perencanaan sosial (*social planning*). Model pengembangan masyarakat digunakan dalam usulan program karena masyarakat dipandang bukan sebagai masalah, tetapi mereka mempunyai potensi yang dikembangkan. Model perencanaan sosial digunakan karena dalam program yang diusulkan oleh peneliti melibatkan berbagai sistem sumber yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

2.2.5.3. Prinsip Praktik Pekerjaan Sosial Komunitas

Pekerja sosial makro tidak terlepas dari prinsip-prinsip praktik profesi pekerjaan sosial. Korelasi dari prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip praktik pekerjaan sosial makro menurut Jim Ife (2002) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan yang bersumber dari bawah (*bottom-up development*)

Prinsip ini didasari oleh premis bahwa pengetahuan, kebijaksanaan, keterampilan, dan pemahaman lokal merupakan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, serta perlu lebih dihargai dibandingkan kebijakan dan pengalaman top-down. Gagasan dari pembangunan *bottom-up* adalah jantung dari pengembangan masyarakat serta berkaitan dengan prinsip-prinsip lainnya.

2. Menghargai kebijaksanaan, pengetahuan, dan keterampilan *bottom-up*

Prinsip ini merupakan esensi dari pengembangan *bottom-up*. Pengetahuan lokal lebih dikontekstualisasikan dibandingkan pengetahuan eksternal. Masyarakat lokal akan lebih mengetahui mana yang layak dan yang tidak layak, mana yang menyinggung dan mana yang tidak menyinggung, serta mana yang akan paling berhasil. Persepsi pengembangan masyarakat menyatakan bahwa keahlian lokal merupakan opsi yang harus dipilih dan diutamakan, dan keahlian eksternal seharusnya hanya digunakan saat keahlian lokal tidak tersedia.

3. Bergantung pada diri sendiri, mandiri, dan saling ketergantungan

Bergantung pada diri sendiri atau *self-reliance* dalam pengembangan masyarakat mengandung arti bahwa masyarakat seharusnya berusaha mencari

sumber yang ada di dalam masyarakat dibandingkan bergantung pada komunitas lain ataupun dengan pemerintah karena akan lebih berkelanjutan.

4. Keberagaman dan Inklusivitas

Penting untuk mengetahui bahwa pengembangan masyarakat didasari oleh pemahaman bahwa 'di dalam keberagaman ada kekuatan'. Prinsip ini merupakan pendekatan yang didasari oleh inklusivitas bukan eksklusivitas, yaitu pendekatan yang menerima orang baru sebagai seseorang yang dapat diterima serta memperkaya keragaman komunitas.

5. Pentingnya berproses

Salah satu prinsip penting dalam pengembangan masyarakat adalah menghargai proses. Proses sangatlah penting dalam pengembangan masyarakat, proses merupakan fokus dari pengembangan masyarakat, bukanlah hasil. Peran dari pekerja sosial makro bukanlah 'untuk memastikan hasil yang baik' melainkan untuk memastikan proses yang baik, sehingga pelajaran yang penting diketahui oleh pekerja sosial makro adalah untuk mempercayai proses.

6. Partisipasi

Partisipasi merupakan aspek penting dalam pengembangan masyarakat. Penting bagi pekerja sosial untuk mengetahui bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang aktif dan partisipatif, dimana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi dengan berbagai cara.

7. Mendefinisikan kebutuhan

Mendefinisikan kebutuhan merupakan hal yang penting dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat bisa dianggap sebagai proses dimana masyarakat bersatu untuk mendefinisikan kebutuhannya serta bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut perspektif pengembangan masyarakat, masyarakat harus terlibat dalam pendefinisian kebutuhan meskipun ada ahli yang dapat membantu.

Prinsip pekerja sosial yang diterapkan dalam usulan program penelitian ini adalah prinsip pentingnya berproses dan partisipasi. Prinsip pentingnya berproses menjadi salah satu prinsip pengembangan masyarakat yang digunakan dalam usulan program. Hal ini karena dengan menghargai proses, kita akan menghargai diri sendiri dan merasa bangga atas pencapaian yang diraih meskipun pencapaian tersebut belum maksimal. Partisipasi sangatlah penting dalam pengembangan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam program yang diusulkan dapat membuat program tersebut berjalan dan berkelanjutan karena masyarakat merupakan fokus utama dan tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat.

2.2.5.4. Metode, Strategi, dan Taktik Pekerja Sosial Komunitas

Praktik pekerja sosial komunitas tentunya memiliki metode yang digunakan dalam praktiknya, yaitu metode pekerjaan sosial masyarakat (*community work*). Adapun strategi dan taktik pekerja sosial komunitas dalam berpraktik dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Strategi dan Taktik Pekerja Sosial Komunitas

No	Strategi	Taktik
1.	Kolaborasi (<i>Collaboration</i>) Sistem sasaran setuju (atau diyakinkan untuk setuju) dengan sistem kegiatan, bahwa perubahan dibutuhkan dan didukung pengalokasian sumber	1) Implementasi 2) <i>Capacity Building</i> a. Partisipasi b. <i>Empowerment</i>
2.	Kampanye (<i>Campaign</i>) Sistem sasaran mau berkomunikasi dengan sistem kegiatan, tetapi hanya sedikit kesepakatan akan perlunya perubahan, atau sistem sasaran mendukung perubahan, tetapi tidak mengalokasikan sumber.	1) Pendidikan 2) Persuasi a. <i>Cooptation</i> /bergabung b. <i>Lobbying</i> /melobi 3) Meminta bantuan media massa (<i>mass media appeal</i>)
3.	Kontes (<i>Contest</i>) Sistem sasaran menentang perubahan dan atau menentang pengalokasian sumber dan tidak membuka komunikasi mengapa mereka menantang	<i>Bargaining and negotiation</i> (tawar-menawar dan perundingan) <i>Large-group action</i> atau aksi komunitas a. Legal (ex: demonstrasi) b. Ilegal (ex: kegiatan yang melawan aturan resmi/tindakan anarkis) Aksi penuntutan perkara (<i>class action/action lawsuit</i>)

Sumber: Praktikum Komunitas, 2023

2.2.5.5. Sistem Sumber

Allen Pincus dan Anne Minahan dalam Dwi Heru Sukoco (2021) mengklasifikasikan sumber kedalam tiga jenis yaitu:

1. Sistem Sumber Informal (*informal or natural resource systems*), berupa keluarga, teman, tetangga, maupun orang-orang lain yang bersedia membantu. Bantuan yang dapat digali dan dimanfaatkan dari sumber-sumber alamiah tersebut adalah dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan konkret lainnya seperti pinjam uang.
2. Sistem Sumber Formal (*formal resource systems*), merupakan keanggotaannya di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sistem sumber tersebut juga

dapat membantu anggotanya untuk bernegosiasi dan memanfaatkan sistem sumber kemasyarakatan.

3. Sistem Sumber Kemasyarakatan (societal resource systems), berupa rumah sakit, badan-badan adopsi, program-program latihan kerja, pelayanan-pelayanan resmi, dan sebagainya. Orang di dalam kehidupannya terkait dengan sistem sumber kemasyarakatan seperti sekolah, pusat-pusat perawatan anak, penempatan-penempatan tenaga kerja, program-program tenaga kerja dan sebagainya. Orang juga terkait dengan badan-badan pemerintah dan pelayanan-pelayanan umum lainnya seperti perpustakaan umum, kepolisian, tempat-tempat rekreasi dan pelayanan perumahan.

2.2.6. Kajian Konseptual tentang Pekerjaan Sosial dengan Pengembangan Pariwisata

Proses pembangunan nasional memerlukan tiga aspek yang harus dicakup secara seimbang untuk dapat berjalan secara optimal dan bersaing dengan global yang memuat tiga misi utamanya, yaitu pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat, dan pengembangan manusia (Suharto, 2005). Hal tersebut sejalan dengan tujuan pertama dan utama pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu penanggulangan kemiskinan dalam segala manifestasinya.

Hausler dalam Arifin (2017) menjelaskan bahwa *Community Based Tourism* merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal, baik pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian kesempatan akses dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan masyarakat. Fildzah (2015)

menjelaskan bahwa *Community Based Tourism* merupakan suatu konsep yang menekankan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata oleh mereka sendiri. Konsep ini menekankan pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan dan pembangunannya sehingga dalam kemanfaatannya diperuntukan sebesar-besarnya kepada masyarakat itu sendiri. Bahkan menurut Nurhayati (2012) dalam Anindya Arifin (2017), sasaran utama dari konsep CBT adalah pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pekerja sosial sebagai profesi kemanusiaan yang membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu saja dapat berperan dalam suatu pembangunan maupun pengembangan industri pariwisata. Heru Sukoco (1995) menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki banyak peran yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan *setting* praktiknya. Adapun peran yang dapat dijalankan oleh pekerja sosial dalam suatu pembangunan maupun pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. *Pemercepat Perubahan (Enabler)*, pekerja sosial dapat berperan dalam membantu individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya.
2. *Perantara (Broker)*, pekerja sosial dapat berperan sebagai perantara untuk menghubungkan orang dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat agar

dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh individu, keluarga, maupun masyarakat.

3. Pendidik (*Educator*), pekerja sosial dapat menjalankan peran sebagai pendidik dengan menyampaikan informasi yang baik dan jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran perubahan.
4. Tenaga Ahli (*Expert*), pekerja sosial dapat menjalankan peran sebagai tenaga ahli yang dapat memberikan masukan, saran, maupun dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat) sesuai dengan kemampuannya.
5. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Pekerja sosial dapat menjalankan peran sebagai perencana sosial dengan melakukan pengumpulan data mengenai masalah sosial yang dihadapi oleh individu, kelompok, dan masyarakat, kemudian menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan.

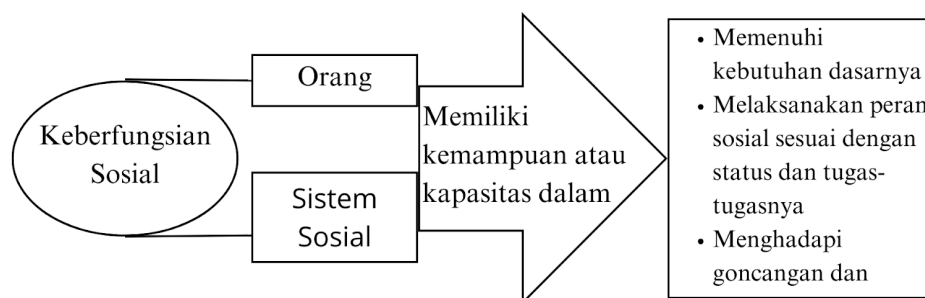
6. Fasilitator

Pekerja sosial dapat menstimulasi maupun mendukung proses pengembangan masyarakat. Peran tersebut dilakukan untuk mempermudah proses perubahan pada individu, kelompok, dan masyarakat, menjadi katalisator untuk bertindak dan membantu pada seluruh proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran, dan alat yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Secara umum, pekerja sosial dapat berperan sesuai dengan peran-peran yang disebutkan di atas. Meskipun demikian, dalam pengembangan masyarakat

yang dilakukan dalam pengembangan suatu kawasan wisata juga haruslah bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna (Suharto, 2017).

Keberfungsian sosial merupakan suatu konsep penting dan pembeda antara pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Suharto (2017) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai kemampuan seseorang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, dan menghadapi goncangan dan tekanan (*shocks and stresses*).



Gambar 2.3 Konsep tentang Keberfungsian Sosial
Sumber: Suharto, 2017

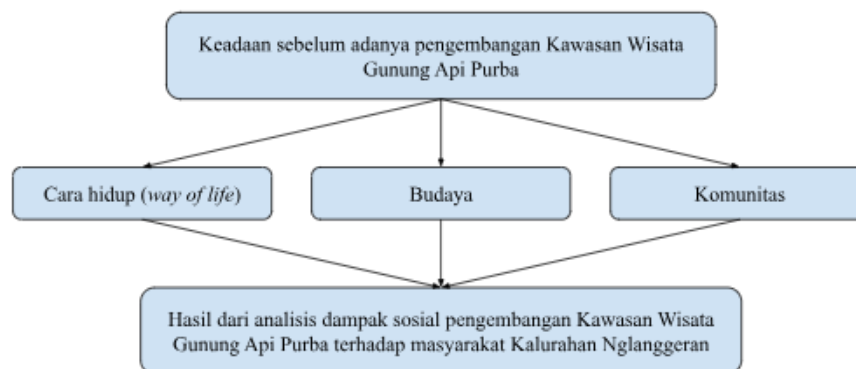
Pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah yang dialaminya;

- 2) Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka dalam menjangkau berbagai sumber, pelayanan, maupun kesempatan;
- 3) Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu untuk memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berperikemanusiaan.
- 4) Merumuskan dan mengembangkan kebijakan yang mampu menciptakan situasi kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut alur kerangka pemikiran penelitian ini:



Gambar 2.4 Alur Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Penelitian Tahun 2024

Pengembangan kawasan wisata merupakan suatu aktivitas pembangunan yang memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan dan proporsionalitas, serta memberdayakan masyarakat setempat. Berkembangnya suatu wisata tentunya berdampak terhadap masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pengembangan wisata dapat berupa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut teori Armour, dampak sosial merupakan konsekuensi sosial yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang

diakibatkan oleh aktivitas pembangunan.

Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran tentunya membawa dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar, khususnya Masyarakat Kalurahan Nglanggeran. Dampak yang dirasakan dapat berupa dampak positif dan negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Kondisi sosial masyarakat sebelum adanya pengembangan wisata mayoritas merupakan petani, namun setelah adanya pengembangan kawasan wisata banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor wisata. Selain itu, pengembangan kawasan wisata membuat pendapatan masyarakat, menciptakan peluang usaha baru, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Pengembangan wisata yang dilakukan di Kalurahan Nglanggeran tidak membuat interaksi sosial masyarakat berkurang, bahkan cenderung meningkat baik itu dengan tetangga sekitar maupun dengan masyarakat pendatang. Interaksi sosial yang dilakukan dengan masyarakat pendatang tersebut membuat beberapa masyarakat mengalami perubahan perilaku verbal. Hal ini dikarenakan latar belakang yang berbeda antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang mempengaruhi cara berkomunikasi dan berbahasa masyarakat setempat. Perubahan perilaku verbal tersebut membuat masyarakat setempat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat pendatang.

Pengembangan kawasan yang dilakukan tidak membuat masyarakat berubah menjadi individualis, masyarakat tetap saling bekerjasama dan bergotong

royong dalam membangun Kalurahan Nglanggeran menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Selain itu, norma-norma yang berlaku di masyarakat juga terus dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Adanya pengembangan kawasan wisata memang membuat pernah terjadinya pelanggaran sosial di Kalurahan Nglanggeran meskipun minim terjadi, pelanggaran sosial yang dilakukan hanya berupa pencurian hewan ternak, vandalisme, dan balap liar di ruas jalan baru. Meskipun demikian, pelanggaran sosial yang dilakukan sudah ditindaklanjuti dan masyarakat cenderung takut untuk melakukan pelanggaran sosial karena Kalurahan Nglanggeran merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan bahkan dulunya dipercaya terdapat banyak orang pintar.

Aspek budaya Masyarakat Kalurahan Nglanggeran tentunya juga mengalami beberapa perubahan akibat adanya pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Kearifan lokal yang ada di Kalurahan Nglanggeran diangkat oleh pengelola wisata sebagai salah satu daya tarik/atraksi wisata yang ada di Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Selain itu, dengan adanya pengembangan wisata yang dilakukan membuat pelaksanaan tradisi dan adat istiadat terus dilestarikan.

Aspek komunitas Masyarakat Kalurahan Nglanggeran tentu saja juga mengalami beberapa perubahan akibat adanya pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Struktur masyarakat yang ada di Kalurahan Nglanggeran mengalami perubahan yang dinamis meskipun cenderung stabil, masyarakat yang tadinya merantau banyak yang kembali. Tingkat mobilitas masyarakat juga terdapat kecenderungan meningkat karena semenjak adanya

pengembangan kawasan wisata terdapat perbaikan dan penambahan infrastruktur penunjang pariwisata, salah satunya adalah pembuatan ruas jalan Talang-Ngalang yang kemudian juga mempermudah akses jalan masyarakat. Kohesi sosial antara sesama masyarakat maupun dengan pihak luar baik itu pemerintah maupun *non government organisation* (NGO) semenjak adanya pengembangan wisata dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antar masyarakat dalam pengembangan wisata, kerjasama dengan pemerintah, serta kerjasama dengan berbagai CSR perusahaan.

Stabilitas masyarakat semenjak adanya pengembangan kawasan wisata juga meningkat karena terdapat peningkatan keamanan oleh pihak pengelola wisata di berbagai titik Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran. Selain itu, berbagai fasilitas publik yang ada di Kalurahan Nglanggeran juga meningkat semenjak adanya pengembangan kawasan wisata yang dilakukan.

Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran dikhawatirkan dapat memunculkan pergeseran terhadap kehidupan sosial Masyarakat Kalurahan Nglanggeran. Apabila pengembangan kawasan wisata yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan beberapa kerugian sekaligus. Pertama, sektor pertanian jadi terbengkalai, petani beralih profesi menjadi penjual jasa wisata. Kedua, terjadi urbanisasi yang dapat menimbulkan pengangguran. Ketiga, terjadi spekulasi tanah sehingga harga tanah semakin mahal dan tidak jarang menimbulkan konflik sengketa lahan. Keempat, terjadi pengikisan kehidupan beragama. Kelima, terjadi komersialisasi seni budaya, yang menjurus pada terjadinya penurunan kualitas hasil kebudayaan itu sendiri.